

Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAHAKAM ULU



BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Komplek Perkantoran Semi Permanen,
Jl.Poros Ujoh Bilang – Long Melaham

Nomor Telepon : 081255505080

Website : bapenda.mahakamulukab.go.id

E-Mail : bapenda@mahakamulukab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ujoh Bilang, 5 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu



JOSMAN,S.IP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19720610 200604 1 021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

- Capaian Sasaran strategis 1 Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah. Diukur dengan indikator Sasaran Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi dengan rumus hitung yaitu $\text{Target dibagi Realisasi dikali } 100\%$.
- Capaian Sasaran strategis 2 Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan. Diukur dengan indikator Sasaran Persentase Program / Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang Diikuti / Dilaksanakan dengan rumus hitung yaitu $\text{Target dibagi Realisasi dikali } 100\%$.
- Capaian Sasaran strategis 3 Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Diukur dengan indikator Sasaran Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah dengan rumus hitung yaitu $\text{Target dibagi Realisasi dikali } 100\%$.
- Capaian Sasaran strategis 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Diukur dengan indikator Sasaran Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP dengan rumus hitung yaitu $\text{Target dibagi Realisasi dikali } 100\%$.
- Capaian Sasaran strategis 5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran. Diukur dengan indikator Sasaran Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran dengan rumus hitung yaitu $\text{Target dibagi Realisasi dikali } 100\%$.

Terhadap capaian Sasaran Kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ke depan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan di bidang Pajak Daerah.
2. Fasilitas Pendukung Kemudahan Transaksi Pembayaran Pajak Daerah belum Tersedia.
3. Belum adanya sektor unggulan PAD khusus kabupaten Mahakam Ulu dan strategi pemungutannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Anggaran	3
1.4. Dasar Hukum	3
1.5. Sistematika Laporan Kinerja	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	4
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja	14
3.1.1. Skala Capaian Kinerja	15
3.1.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	15
3.1.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	16
3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	17
3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	18
3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	21
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	21
3.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	4
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025.....	4
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu	6
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025	7
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025	7

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025.....	11
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	11
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2022 s/d 2024.....	16
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	18
Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	18
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	21
Tabel 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	22
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.....	2
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan dijanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu :

Pembentukan Badan Pendapatan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5395); sebagai penyempurnaan dari Perda Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Badan Pendapatan berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu di bidang Pendapatan Daerah.

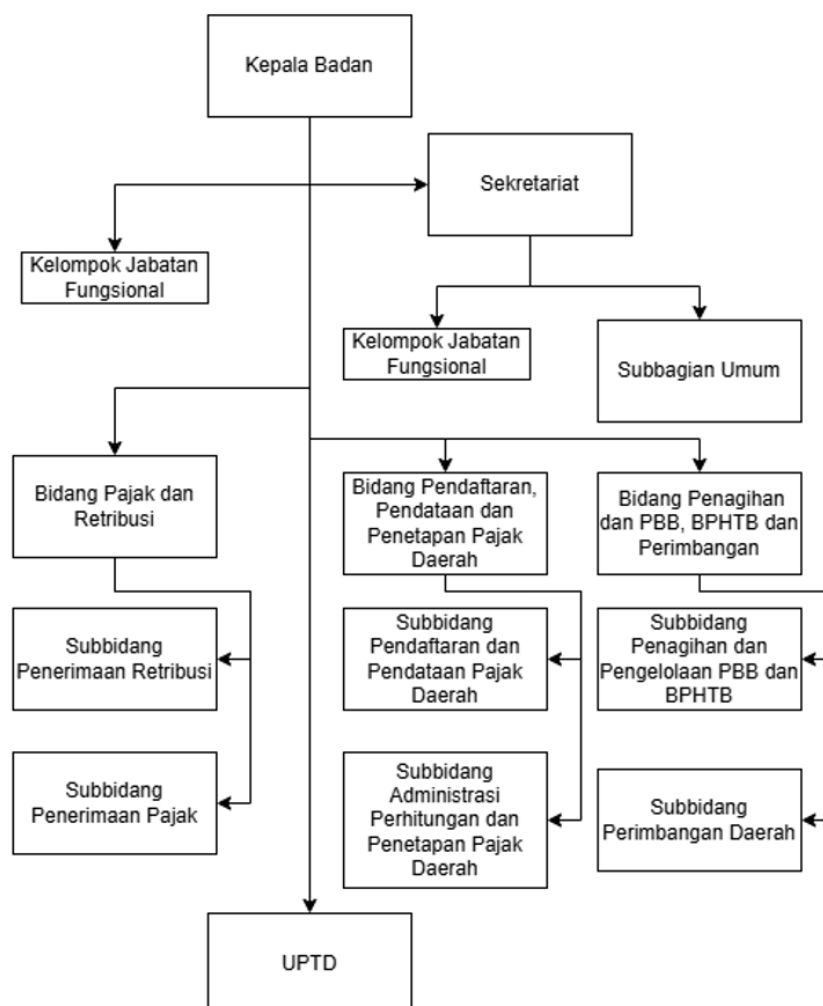
1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BADAN PENDAPATAN DAERAH mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut BADAN PENDAPATAN DAERAH mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- f. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja BADAN PENDAPATAN DAERAH. Berikut bagan struktur organisasi BADAN PENDAPATAN DAERAH.



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Sumber : Perbup Mahakam Ulu No. 23 Tahun 2023

1.3. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	Rp. 16.222.043.249,-
APBD	2025	Rp. 14,454,384,181,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp.-

Sumber : DPA Badan Pendapatan Daerah

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja BADAN PENDAPATAN DAERAH ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah *Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan, dan Akuntabel*. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan, dan Akuntabel	1.2.1 Meningkatkan kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Renstra BADAN PENDAPATAN DAERAH Periode 2021 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan	Persentase	Ukuran keberhasilan pemungutan pajak daerah yang membandingkan antara	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	BPKAD

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pajak Daerah yang Terealisasi		jumlah uang pajak yang benar-benar masuk ke kas daerah (realisasi) dengan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD pada tahun berjalan.		
2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	Persentase	Tingkat partisipasi dan kepatuhan unit kerja dalam mengikuti seluruh tahapan, rapat koordinasi, dan penyusunan dokumen teknis rencana anggaran pendapatan sesuai dengan jadwal perencanaan yang ditetapkan.	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	BAPENDA
3	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Persentase	kualitas pengelolaan data retribusi yang mencakup pemutakhiran data objek/subjek retribusi, pemeliharaan basis data elektronik, serta ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi retribusi kepada pimpinan.	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	BAPENDA
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Persentase	Skor atau nilai yang diperoleh Perangkat Daerah atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menunjukkan sejauh mana perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja selaras dengan penggunaan anggaran.	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	Data diolah
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase	Tingkat ketersediaan dan ketepatan layanan pendukung internal kantor (seperti alat tulis kantor, pemeliharaan gedung, pembayaran listrik/air, dan administrasi umum) guna mendukung	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	BAPENDA

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				kelancaran tugas pokok dan fungsi pegawai.		

Sumber: Indikator Kinerja Utama BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan, dan Akuntabel		Opini BPK	Opini	WTP
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	%	100
		Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	%	100
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	%	95
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	%	65
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	%	93

Sumber : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja

yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	100%
2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	100%
3	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	95%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	65%
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	93%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.916.719.328,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 397.486.200,-
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.328.297.200,-

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Orang/Bulan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>		
1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>		
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP-nya	1010 Obyek Pajak

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	150 Dokumen
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	150 Layanan
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen
10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 518.268.300
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.525.227.528
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 173.287.500
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 453.442.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.039.463.600
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 33.388.400
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.109.196.000
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 64.446.000
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 397.486.200
10. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4.328.297.200

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

Pada tanggal 4 bulan November tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian

tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran. dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	100%
2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	100%
3	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	95%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	65%
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	93%

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.12.011.056.581,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.184.536.200,-
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.2.528.791.400,-

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Orang/Bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	3 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>		
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP-nya	1010 Obyek Pajak
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	150 Dokumen
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	150 Layanan
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen

No.	Sasaran Strategis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025
(setelah perubahan)

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 476.234.600,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.717.176.781,-
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 81.714.500,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 453.143.000,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.116.976.100,-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 40.236.400,-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.059.025.200,-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 66.550.000,-
9	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 184.536.200,-
10	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.258.791.400,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya di kelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

3.1.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	100%	123,51%	100%	Sangat Tinggi	LRA Penerimaan Bapenda Bulan Desember 2025
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025
	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	95%	95%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025
	Meningkatnya Akuntabilitas	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	65%	67,75%	100%	Sangat Tinggi	LHE Badan Pendapatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kinerja Perangkat daerah						Daerah Kab. Mahulu Tahun 2024
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	93%	93%	100%	Sangat Tinggi	Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sumber : Data Diolah

Penerimaan Pajak Daerah yang terealisasi pada tahun 2025 Sangat tinggi, hal ini tergambar dari realisasi penerimaan pajak daerah yang melebihi target. Untuk target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 6.189.141.548,96,- dan realisasi sebesar Rp7.612.123.507,00,-.

Untuk indikator kinerja persentase program/kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran pendapatan yang diikuti/dilaksanakan; persentase pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah; persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran sangat tinggi tergambar dari laporan kinerja per sub kegiatan terlampir.

3.1.3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2022 s/d 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2022 s/d 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(9)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	63,59%	81,84%	85,91%	100%	123,51%	100%
2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang	94,56%	94,30%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(9)
		diikuti/dilaksanakan						
3	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	84%	99,67%	90%	95%	95%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	63,60%	63,91%	67,75%	65%	67,75%	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	90%	80%	90%	93%	93%	100%

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan hasil pengukuran, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang baik dan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah menunjukkan peningkatan dengan realisasi sebesar 123,51% dari target. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran pendapatan serta administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah masing-masing mencapai target dengan tingkat capaian 100%. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui evaluasi implementasi SAKIP tahun 2024 juga melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 67,75%, sedangkan untuk tahun 2025 masih belum dilaksanakan evaluasi sehingga mengadopsi nilai yang telah didapatkan pada tahun 2024. Sementara itu, pelayanan administrasi dan operasional perkantoran telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	123,51%	100%	100%
2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	90%	95%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	67,75%	65%	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	93%	93%	100%

Sumber : data diolah

Realisasi kinerja untuk sasaran strategis tahun 2025 melampaui target di akhir renstra (2026). Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak daerah terealisasi dengan sangat baik yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan PAD yang melebihi target sebesar 23,51%, hal ini terjadi dikarenakan pegawai yang aktif dalam mengawal dan menjemput penerimaan Pajak kepada WP dan di lapangan, penetapan target yang terukur dan tepat, dan koordinasi lintas sektor seperti OPD teknis, PLN dan Bapenda Provinsi. capaian impresif ini diraih di tengah kendala **keterbatasan jumlah pegawai**, yang menyebabkan beban kerja menjadi sangat tinggi dan berisiko terhadap keberlanjutan intensitas pengawasan di lapangan pada masa mendatang.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yang Terealisasi	100%	123,51%	100%	Realisasi penerimaan pajak dapat melewati target dikarenakan pegawai yang aktif dalam mengawal dan	ke depannya akan ditingkatkan pendataan basis data yang mendukung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						menjemput penerimaan Pajak kepada WP dan di lapangan, penetapan target yang terukur dan tepat, dan koordinasi lintas sektor seperti OPD teknis, PLN dan Bapenda Provinsi. Meski begitu, realisasi pajak sarang burung walet, BPHTB, dan PBJT TL Non-PLN belum mencapai target.	pemungutan pajak daerah, penguatan regulasi untuk penertiban dan stimulan, serta memperkuat dukungan teknologi dalam pengawasan dan monitoring ketaatan wajib pajak. Serta mengupayakan sistem pembayaran secara non tunai
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan	100%	100%	100%	Realisasi Persentase Program/Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan yang diikuti/dilaksanakan tercapai dipengaruhi dengan aktifnya BAPENDA Mahulu mengikuti kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dan Komunikasi dan koordinasi berjalan efektif, didukung kesiapan data serta kemampuan teknis pegawai yang memadai. Serta, dukungan pimpinan dan sistem kerja internal yang tertata baik turut memperlancar proses sehingga seluruh target kegiatan dapat tercapai 100%.	Dokumentasi hasil koordinasi yang belum selalu lengkap serta ketergantungan pada jadwal dan kebijakan instansi provinsi yang dapat membatasi fleksibilitas. Selain itu, belum semua hasil koordinasi dapat diimplementasikan secara optimal, dan kualitas partisipasi pegawai belum merata, yang dapat memengaruhi kesinambungan pelaksanaan kegiatan ke depan
	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	95%	100%	100%	Peningkatan keakuratan data retribusi daerah dilakukan melalui penerapan sistem informasi yang andal, didukung dengan peningkatan kapasitas SDM dalam pengolahan, pelaporan, dan pemeliharaan data. Selain itu, di terapkannya prosedur standar yang jelas dan terukur, memperkuat koordinasi dengan OPD atau pihak terkait, serta	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala guna memastikan proses berjalan efektif dan efisien.	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Persentase Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	65%	67,75%	100%	implementasi SAKIP tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 104,23%, sedangkan untuk tahun 2025 masih belum dilaksanakan evaluasi sehingga mengadopsi nilai yang telah di dapatkan pada tahun 2024	menjadwalkan dan melaksanakan evaluasi mandiri (self-assessment) serta koordinasi dengan inspektorat untuk penilaian SAKIP tahun berjalan agar data kinerja tetap relevan dan tidak tertinggal.
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	93%	100%	100%	Realisasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran tercapai, di pengaruhi dengan adanya anggaran yang memadai.	

Sumber : Data Diolah

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 berada dalam kategori **sangat baik**, dengan seluruh indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan manajemen yang kuat, serta koordinasi yang berjalan optimal.

Meskipun demikian, tetap diperlukan:

- Peningkatan kualitas SDM,
- Penguatan sistem digital dan pengawasan,
- Optimalisasi kepatuhan wajib pajak,
- Penyempurnaan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja.

Upaya perbaikan berkelanjutan ini penting untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Hemat
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	100%	123,51%	100%	2.258.791.400	2.172.066.084	96,16%	3,84%
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan	100%	100%	100%	184.536.200	166.750.193	90,36%	9,64%
	Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	95%	95%	100%	81.714.500	78.247.343	95,76%	4,24%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	65%	67,75%	100%	476.234.600	369.341.739	77,55%	22,45%
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	93%	93%	100%	11.453.107.481	9.980.165.215	87,14%	12,86%

Sumber : Data diolah

Rasio efisiensi BAPENDA menggunakan rumus capaian indikator kinerja/capaian realisasi anggaran x 100%. Efisiensi mencapai 100% hal ini didukung oleh adanya upaya penghematan penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian kinerja.

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(5)	(9)
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan ini mendukung pencapaian tujuan karena menghasilkan dokumen perencanaan yang sistematis dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja lebih optimal.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan ini menunjang keberhasilan karena meningkatkan koordinasi serta menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu, sehingga memudahkan pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjang keberhasilan karena menjamin hak ASN terpenuhi tepat waktu sehingga meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja dalam pelaksanaan tugas.
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas melalui penyediaan kebutuhan administrasi yang memadai, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Program atau kegiatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi pendapatan daerah guna menghemat waktu, biaya, dan meminimalkan kesalahan, sekaligus memperkuat transparansi dan koordinasi antar instansi agar lebih efektif. program ini juga mendorong peningkatan kapasitas SDM serta kualitas laporan sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Menunjang kedisiplinan, identitas, dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan pemahaman dan kompetensi ASN terhadap regulasi yang berlaku, sehingga

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(5)	(9)
			pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan meminimalkan kesalahan administratif.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menunjang kelancaran aktivitas perkantoran dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif.
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pegawai melalui ketersediaan peralatan kerja yang memadai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mendukung kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktif.
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menunjang kelancaran administrasi dan dokumentasi kegiatan melalui penyediaan dokumen, laporan, dan bahan pendukung lainnya secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menjamin ketersediaan kebutuhan operasional harian sehingga aktivitas perkantoran dapat berjalan tanpa hambatan.
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antar perangkat daerah guna mendukung keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan.
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan.
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Mebel	Menunjang kenyamanan dan kerapian ruang kerja sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mendukung kelancaran komunikasi dan distribusi dokumen resmi secara tepat waktu dan sesuai prosedur administrasi.
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menjamin keberlangsungan operasional perkantoran melalui ketersediaan layanan komunikasi, air, dan listrik secara berkesinambungan.
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjang pemeliharaan dan fungsi optimal peralatan kerja sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menunjang kelancaran operasional perkantoran melalui dukungan layanan administrasi dan pelayanan internal sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib, efektif, dan efisien.

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(5)	(9)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Menunjang kenyamanan, keamanan, dan kelayakan sarana prasarana sehingga kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Menjamin kendaraan dinas dalam kondisi baik dan legal secara administrasi sehingga mendukung kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas kedinasan.
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kegiatan ini berperan penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian karena memastikan ketepatan perhitungan target pendapatan, sinkronisasi data pusat–daerah, pemenuhan persyaratan penyaluran dana, dan tersedianya data yang akurat untuk perencanaan dan analisis kinerja. Koordinasi yang baik menurunkan risiko keterlambatan / tidak tepatannya penyaluran dana dari pemerintah pusat, sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Program atau kegiatan tersebut merupakan kegiatan untuk membuat perda yang di mana sebagai payung hukum dalam penagihan pajak dan retribusi daerah, sekaligus bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar pengelolaan administrasi pendapatan daerah guna meminimalkan risiko kesalahan.
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sosialisasi kepada masyarakat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan mendorong kepatuhan, yang berdampak pada kenaikan capaian realisasi pajak daerah.
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB P2 di Kabupaten Mahakam Ulu perlu terus dikembangkan untuk segera dapat berbasis sistem aplikasi agar dapat menjawab kebutuhan layanan yang akurat, cepat dan berorientasi memudahkan bagi Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya;
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan Objek Pajak Daerah dilakukan secara berkala dan secara langsung ke calon Wajib Pajak potensial di 5 (lima) kecamatan sehingga sekaligus

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(5)	(9)
			merupakan sarana sosialisasi untuk meningkatkan ketaatan Pajak Daerah. Pendaftaran Objek Pajak merupakan langkah pertama dalam proses pemungutan Pajak Daerah, sehingga layanan pendaftaran yang optimal sangat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sangat menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja karena Basis Data Pajak Daerah yang lengkap dan ter update dengan baik merupakan dasar analisis untuk kebijakan dan langkah strategis yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian nilai objek pajak yang tepat berpengaruh langsung pada besarnya pajak terutang sehingga mendukung peningkatan PAD
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah sangat menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja karena memastikan kesesuaian pelaporan Wajib Pajak dengan nilai Pajak Daerah yang dibayarkan.
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah sangat menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja karena menyediakan layanan bantuan perhitungan perpajakan daerah secara lebih akurat dan memberikan layanan konsultasi gratis bagi Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak yang membutuhkan penjelasan tentang Pajak Daerah.
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	kegiatan tersebut dilaksanakan karena verifikasi dan pelaporan pajak merupakan realisasi data tetap PAD yang telah tersinkronisasi, dan juga dapat meningkatkan akurasi data administrasi pendapatan daerah guna meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan aktif berkontribusi langsung pada peningkatan realisasi pendapatan terutama dari piutang pajak daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian keberatan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan menjaga kelancaran proses pemungutan.
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sangat menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja karena program ini utamanya menganalisis tunggakan, kesalahan hitung, kecurangan, keberatan dan kelalaian Wajib Pajak dalam perhitungan nilai Pajak Daerah. Secara berkala program ini melaporkan dan menangani Wajib Pajak yang bermasalah dan membutuhkan penanganan lebih lanjut bekerja sama dengan stakeholder – stakeholder di luar Bapenda.

No.	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Alasan Mengapa Program/Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
(1)	(2)	(5)	(9)
			Data yang dihasilkan program ini juga sangat membantu untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dan regulasi perpajakan daerah yang lebih tepat.
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan administrasi pendapatan daerah guna meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar kepuasan meningkat, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sangat menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja karena menjadi sarana pemetaan, pendorong, monitoring dan evaluasi kewajiban Pemerintah Daerah untuk segera beralih ke sistem elektronik. Akurasi dan kecepatan yang disediakan teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan proses perhitungan dan transaksi pembayaran Pajak Daerah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah juga merupakan bagian penting dari Monitoring Center for Prevention KPK.

Sumber : Data diolah

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	284.787.800	178.312.019	62,61 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	191.446.800	191.029.720	99,78 %
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.434.816.781	6.604.142.750	88,83 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.360.000	232.800.000	82,45 %
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	81.714.500	78.247.343	95,76 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	348.079.000	338.988.453	97,39 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.206.400	60.154.985	96,70 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	411.278.600	379.676.006	92,32 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.091.000	15.018.000	99,52 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.713.200	206.561.700	98,97 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.780.900	87.780.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.438.000	277.852.801	99,79 %
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.468.000	53.181.600	99,46 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	40.236.400	40.030.000	99,49 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.965.000	99,42 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.056.000	93.120.427	69,46 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.918.969.200	1.421.915.493	74,10 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.650.000	37.153.000	85,12 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.900.000	22.900.000	100,00 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>			
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	184.536.200	184.535.193	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	314.464.400	271.160.000	86,23 %
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	148.934.500	147.654.159	99,14 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	379.720.200	379.561.705	99,96 %
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	108.718.000	108.680.800	99,97 %
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	120.298.900	120.287.400	99,99 %
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	387.703.100	385.416.373	99,41 %
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	129.319.600	125.185.000	96,80 %
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	101.549.800	99.717.400	98,20 %
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	102.909.000	95.640.985	92,94 %
	Penagihan Pajak Daerah	130.522.300	130.518.000	100,00 %
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	109.960.100	88.951.762	80,89 %
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	75.490.700	75.361.800	99,83 %
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	71.598.900	67.955.000	94,91 %
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	77.601.900	75.975.700	97,90 %

Sumber : Realisasi Fisik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam ulu

Uraian penjelasan tabel:

Total anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 setelah Perubahan anggaran untuk 3 (tiga) Program adalah sebesar Rp. 14.454.384.181 dengan realisasi sebesar Rp. 12.784.355.574 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88,45%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja BADAN PENDAPATAN DAERAH adalah Keterbatasan jumlah SDM dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan di bidang Pajak Daerah.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh BADAN PENDAPATAN DAERAH adalah sebagai berikut:

- Mengajukan Penambahan SDM dengan Kualifikasi yang dibutuhkan di bidang Pajak Daerah.
- Mengikutsertakan Pegawai yang ada dalam diklat teknis yang dilaksanakan oleh DJP direktorat jenderal pajak

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujoh Bilang, 5 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu



IOSMAN,S.IP
Pembina Tk I (IV.b)
NIP. 19720610 200604 1 021